



KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH PENDORONG KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI JAWA TENGAH

Eliza Dewi Susanto[✉], Henny Murtini

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2015
Disetujui Oktober 2015
Dipublikasikan
November 2015

Keywords:
Characteristics of Local Government; Wealth; Leverage; Level of Investment; and Regional Financial Independence.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang berupa *wealth*, *leverage*, dan tingkat investasi terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 pemda, dengan jumlah sampel sebanyak 33 secara *purposive sampling* dan jumlah data yang dianalisis sebanyak 97. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Neraca pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011-2013 dan data statistik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial *wealth* dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan tingkat investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, memperluas obyek penelitian dan menambah jumlah sampel yang digunakan agar penelitian lebih representatif.

Abstract

The purpose of this study was to determine the influence of the characteristics of local governments in the form of wealth, leverage, and level of investment to financial independence of city/regency's government at Central Java in 2011-2013. The populations in this study are all the cities/regencies in Central Java Province consist of 35 local governments, with total sample 33 by purposive sampling and the amount of data that analyzed is 97. This study uses secondary data in the form of budget realization report and balance sheet report the city/regency at Central Java in 2011-2013 and statistical data. Testing this hypothesis using multiple linear regression with t-test. Based on the results of this study concluded that partially wealth and leverage have positive and significant impact on the region's financial independence. Level of investment whereas no significant effect on the region's financial independence. The suggestions for next study in order to add other variables that can explain or influence regional financial independence, expand object of the study and increase the number of samples are used that study more representative.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: elizadewis@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya (Hadi, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom.

Kemandirian daerah khususnya di bidang keuangan merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi, menurut Nataluddin (2001) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada: (1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Tujuan adanya otonomi daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah nyatanya belum dapat terealisasi dengan baik. Realita yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar. Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama ini selalu menunjukkan bahwa dana perimbangan jauh lebih besar melampaui pendapatan asli daerah. Data tersebut juga menunjukkan bahwa seluruh dengan kemandirian keuangan daerah. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk

pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2011-2013 memiliki jumlah PAD yang lebih kecil bila dibandingkan dengan dana perimbangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam pembiayaan keuangannya dan menunjukkan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah masih rendah.

Pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mencari solusi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Salah satu instrumen dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah dengan memanfaatkan karakteristik keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut. Karakteristik keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari *wealth* atau tingkat kemakmuran suatu daerah, *leverage* atau perbandingan antara hutang dengan modal pada neraca daerah, dan tingkat investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Imawan (2014) menunjukkan bahwa *wealth* berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa *wealth* tidak berpengaruh secara statistik terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Imawan (2014), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara statistik terhadap kemandirian keuangan daerah.

Mengingat hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beda-beda, maka penelitian ini ditujukan untuk meneliti sekali lagi variabel *wealth* dan *leverage* terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini peneliti menambah satu variabel yaitu tingkat investasi dengan harapan dapat menambah keanekaragaman penelitian *wealth* dan *leverage* dalam hubungannya

menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh *wealth*, *leverage*, dan tingkat investasi terhadap kemandirian keuangan daerah.

Teori keagenan dan teori *stakeholder* menjadi *grand theory* dalam penelitian ini. Teori keagenan disini menjelaskan bahwa masyarakat sebagai *principal* memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar tercipta kemandirian keuangan daerah. Sedangkan teori *stakeholder* disini menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Variabel *leverage* memiliki hubungan dengan teori keagenan dimana *leverage* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban pemerintah (*agent*) kepada rakyat (*principal*). Variabel *wealth* dan tingkat investasi memiliki hubungan dengan teori *stakeholder* dimana pemerintah daerah mengelola pendapatan hasil pajak dari masyarakat dan investasi yang ada di daerah untuk mengembangkan potensi daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai *stakeholder*.

Wealth atau kemakmuran adalah kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan guna menuju kesejahteraan. Todaro (2000) menyatakan bahwa pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Menurut Imawan (2014) kemakmuran sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang berjalannya di daerah tersebut. Semakin tinggi kemakmuran suatu daerah, maka semakin besar pendapatan daerah sehingga akan memberikan peluang terhadap meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Imawan (2014) menunjukkan bahwa *wealth* berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

H₁ : *Wealth* berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Leverage merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas, semakin besar hutang yang dimiliki suatu entitas maka semakin rendah kemandirian keuangan entitas tersebut. Menurut Hadi (2010) rasio *leverage* menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari ada atau tidaknya posisi kewajiban entitas dalam hal membiayai pengeluaran untuk pembangunan daerah. Semakin mampu menutup hutang dengan ekuitas dana yang dimiliki berarti semakin kecil unsur hutang sehingga semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebannya daerah dengan sumber dana eksternal berupa pinjaman atau hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *leverage* dengan kemandirian keuangan daerah.

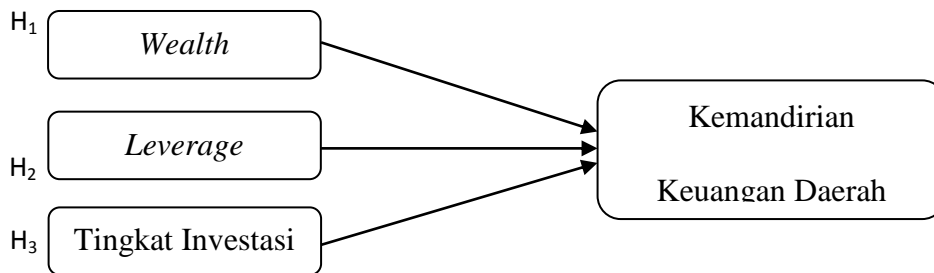
H₂ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tingkat investasi merupakan jumlah uang yang ditanamkan untuk pembangunan industri atau proyek-proyek penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri (Suryono, 2010). Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika arus investasi di suatu daerah mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah berupa pungutan pajak dan terbukanya lapangan kerja. Oleh daerah pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat

keberhasilan otonomi daerah. Dengan demikian tingkat investasi dapat dijadikan indikator dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menuju pada kemandirian keuangan daerah.

H₃ : Tingkat Investasi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 pmda. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan sudah mendapat pertanggungjawaban keakuratan oleh pihak

tertentu, seperti Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Neraca pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan yang dapat menjelaskan nominal seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian secara lengkap selama tahun anggaran 2011-2013 berturut-turut.

Tabel 1 Rincian Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013 dari BPK RI.	35
2.	Laporan Statistik PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013 dari Badan Pusat Statistik.	35
3.	Laporan Rekapitulasi Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013 dari BPMD.	33
*	Jumlah sampel penelitian	33
*	Jumlah unit data yang digunakan selama 3 tahun (33 × 3)	99
*	Data <i>outlier</i> yang dikeluarkan dari sampel	(2)
*	Jumlah data yang digunakan dalam penelitian	97

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Variabel Penelitian

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran	Keterangan
Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan pembangunan.	$\frac{PAD}{TPD} \times 100\%$	PAD = Pendapatan Asli Daerah TPD = Total Pendapatan Daerah
Variabel Independen: <i>Wealth</i>	Kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan guna menuju kesejahteraan.	LN(PDRB Perkapita)	Konversi <i>logaritma natural</i> agar data terdistribusi normal.
<i>Leverage</i>	Kemampuan entitas dalam mengukur perbandingan antara hutang dan ekuitas.	$\frac{Debt}{Equity}$	<i>Debt</i> = Jumlah Kewajiban <i>Equity</i> = Jumlah Ekuitas
Tingkat Investasi	Pertumbuhan investasi di daerah pada periode tertentu.	$\Delta IS = \left(\sqrt[n-1]{\frac{IS_{tn}}{IS_{t0}}} \right) - 1$ $\times 100\%$	ΔIS = Laju Investasi n = jumlah tahun tn = tahun akhir periode $t0$ = tahun awal periode

Sumber: Halim (2013), Wild (2005), Widodo (1990).

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui seleksi sampel dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji statistik F, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics 21*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKD	97	,05299	,33109	,1132778	,05245273
LNWEALTH	97	14,75306	16,56428	15,3340025	,44896131
LEVERAGE	97	,00000	,02769	,0042552	,00490146
TINVEST	97	-,95161	6,56905	,3579817	1,19654720
Valid N (listwise)	97				

Sumber: Output SPSS 21

Hasil analisis deskriptif variabel kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 0,331 pada Kota Semarang dan terendah sebesar 0,053 pada Kabupaten Klaten, nilai rata-rata untuk variabel dependen kemandirian keuangan daerah sebesar 0,113 dengan standar deviasi sebesar 0,052. Variabel *wealth*, tingkat kemakmuran tertinggi sebesar 16,564 pada Kota Semarang dan terendah sebesar 14,753 pada Kabupaten Grobogan, nilai rata-rata sebesar 15,334 dengan standar deviasi sebesar 0,449.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda dengan program IBM

Variabel *leverage* tertinggi sebesar 0,028 pada Kabupaten Sukoharjo dan terendah sebesar 0,000 pada Kabupaten Pati, nilai rata-rata sebesar 0,004 dengan standar deviasi sebesar 0,005. Variabel tingkat investasi tertinggi sebesar 6,569 pada Kota Salatiga di tahun 2012 dan terendah sebesar $-(0,952)$ pada Kota Salatiga di tahun 2013, nilai rata-rata sebesar 0,358 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,197.

SPSS *Statistics* 21 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$KKD = - 1,234 + 0,087 \text{ wealth} + 2,240 \text{ leverage} + 0,002 \text{ tingkat investasi} + e.$$

Tabel 4 Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,234	,119		-10,372	,000
LNWEALTH	,087	,008	,746	11,257	,000
LEVERAGE	2,240	,709	,209	3,160	,002
TINVEST	,002	,003	,050	,748	,456

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Output SPSS 21

1. Pengaruh *Wealth* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil Uji t untuk H_1 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 11,257 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi untuk variabel *wealth* menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Nilai koefisien menunjukkan tanda positif dan sesuai dengan

hipotesis penelitian awal. Jadi, H_1 **diterima** karena terdapat pengaruh positif *wealth* terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Imawan (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *wealth* terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian Kusumawardani (2012) yang

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *wealth* terhadap kemandirian keuangan daerah.

Semakin tinggi *wealth* suatu daerah maka akan diiringi dengan kenaikan kemandirian keuangan daerah. Kemakmuran sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang berjalan di daerah tersebut. Peningkatan pendapatan perkapita akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat akan membelanjakan pendapatan yang diterima di sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian akan memberikan sumbangan kepada pendapatan asli daerah dalam bentuk setoran pajak dan retribusi. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak, sehingga semakin besar pula pendapatan asli daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi akan menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin baik.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil Uji t untuk H_2 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 3,160 dengan signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi untuk variabel *leverage* menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Nilai koefisien menunjukkan tanda positif dan tidak sesuai dengan hipotesis penelitian awal. Jadi, H_2 **ditolak** sehingga ada pengaruh positif yang signifikan *leverage* terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hadi (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Imawan (2014) dengan hasil *leverage* tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini maka dapat diasumsikan bahwa semakin besar *leverage* suatu daerah maka akan diiringi dengan

kenaikan kemandirian keuangan daerah. Asumsi ini didukung dengan *trade-off theory* dimana perusahaan akan selalu berusaha menyesuaikan tingkat *leverage* ke arah yang optimal (Darminto, 2007). Teori ini dapat dihubungkan dalam sektor publik dimana pemerintah daerah akan selalu berusaha menyesuaikan tingkat *leverage* ke arah yang optimal, sehingga tingkat *leverage* pemerintah daerah bergerak terus dari waktu ke waktu untuk arah suatu target yang ingin dicapai yaitu kemandirian keuangan daerah. Tingkat *leverage* yang optimal memiliki batasan dimana penggunaan hutang yang lebih rendah dari batas tersebut itu menjadi titik optimal, namun jika penggunaan hutang melebihi batas maka menjadi tidak optimal.

Berdasarkan *trade-off theory*, hutang tidak selamanya berpengaruh negatif karena jika pemerintah daerah melakukan hutang untuk sumber pembiayaan pembangunan maka dapat menambah pendapatan asli daerah tersebut. Tetapi pemerintah daerah tetap harus mempertimbangkan beban bunga dari jumlah hutang dengan pendapatan asli daerah yang akan diterima sebagai batasan *leverage* yang optimal. Sehingga pemerintah daerah harus menentukan tujuan penyeimbangan antara beban bunga dan biaya kesulitan keuangan dalam menentukan *leverage*. *Trade-off theory* merupakan model yang didasarkan pada *trade-off* antara keuntungan dengan kerugian penggunaan hutang (Fadli, 2010). Dengan meminjam maka pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan pembangunannya, sedangkan apabila meminjam terlalu banyak maka akan menyebabkan timbulnya biaya kesulitan keuangan.

3. Pengaruh Tingkat Investasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil Uji t untuk H_3 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 0,748 dengan signifikansi sebesar 0,456. Nilai signifikansi untuk variabel tingkat investasi menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Jadi, H_3 **ditolak** sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan tingkat investasi terhadap

kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Diketahui dari data rekapitulasi perkembangan penanaman modal menunjukkan jumlah investasi pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi, bahkan terdapat 2 kabupaten yang memiliki jumlah investasi nol. Dapat dilihat pula dari hasil data kelas interval variabel tingkat investasi menunjukkan bahwa 90% pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat investasi yang berkategori rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh kebijakan daerah belum memberikan iklim yang kondusif bagi investor untuk melakukan penanaman modalnya. Upaya untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam mengurus ijin usaha belum sepenuhnya dapat berjalan di daerah. Terdapat 5 daerah dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang hingga kini belum mau menerapkan program

PTSP. Hal ini menunjukkan program pemerintah untuk meningkatkan investasi belum berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *wealth* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tingkat investasi tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel lain yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Selain itu sebaiknya memperluas obyek penelitian dan menambah jumlah sampel yang digunakan agar penelitian lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Darminto. 2007. Pengujian teori *trade-off* dan teori *pecking order* dengan satu model dinamis pada perusahaan publik di Indonesia. *Paper of Seminar on Corporate Finance*.
- Fadli. 2010. Analisis pengaruh faktor-faktor penentu kebijakan struktur modal terhadap *leverage* hipotesis *pecking order* dan *trade off* teori. *Skripsi*. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hadi, Waskito. 2010. Pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap kemandirian daerah (studi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2007 di wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Riset Akuntansi*. 3(1):29-51. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. 1(1). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Imawan, Riswanda. 2014. Analisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. 3(2). ISSN: 2252-6765. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Nataluddin, Nirzawan dan Yuliaty. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jambi*. *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Suryono, Wiratno Bagus. 2010. Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Jawa Tengah. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Todaro, Michael P. 2000. *Economic development*. Seventh Edition. New York: Addition Wesley Longman. Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. *Indikator ekonomi: dasar perhitungan perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wild, John J, et al. 2005. *Financial statement analysis*. Jakarta: Salemba Empat.

